

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah dan kinerja dari suatu pemerintahan erat kaitannya dengan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam konteks pemerintah daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang mencakup seluruh proses pengelolaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan teknis. Melalui pertanggungjawaban ini, pemerintah daerah menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, yang dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Safitri et al, 2023). Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditugaskan oleh pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam laporan kinerja yang disusun secara berkala.

Stephani dan Yonnedi, (2024) bahwa pemerintah telah mengembangkan sebuah sistem untuk mengukur kinerja yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setiap pemerintah daerah harus menerapkan SAKIP dan melaporkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai pihak yang bertugas melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia.

Evaluasi akuntabilitas kinerja berfungsi sebagai alat untuk memetakan (*assess*) dan membina (*assist*) instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan. Proses evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan evaluasi tersebut, Kementerian PANRB dapat menyusun profil instansi pemerintah berdasarkan seberapa efektif dan efisien anggaran yang digunakan. Terdapat tujuh kategori penilaian pemerintah yang didasarkan pada efektivitas dan efisiensi anggaran, yaitu kategori AA (sangat memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), C (kurang), dan D (sangat kurang). Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh, semakin efektif dan efisien pula penggunaan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian target pembangunan nasional dan penyelesaian isu-isu strategis daerah (KemenPAN&RB, 2024). Berikut informasi hasil evaluasi SAKIP 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 1. 1
Indeks Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Kota Tebing Tinggi	B	B	B
2	Kota Sibolga	CC	CC	CC
3	Kota Padangsidempuan	CC	B	B
4	Kota Gunung Sitoli	CC	CC	CC
5	Kab. Toba	CC	CC	CC
6	Kab. Tapanuli Tengah	C	C	C
7	Kab. Simalungun	C	C	CC
8	Kab. Samosir	B	B	B
9	Kab. Padang Lawas Utara	CC	CC	CC
10	Kab. Nias Utara	C	CC	CC
11	Kab. Nias Barat	C	C	C
12	Kab. Mandailing Natal	C	CC	CC
13	Kab. Labuhanbatu Utara	CC	CC	CC
14	Kab. Labuhanbatu	CC	CC	C
15	Kab. Humbang Hasundutan	BB	BB	BB
16	Kab. Dairi	CC	CC	B
17	Kab. Asahan	B	B	B
18	Kota Tanjung Balai	B	B	B
19	Kota Pematang Siantar	C	CC	CC
20	Kota Medan	CC	B	B
21	Kota Binjai	CC	CC	CC
22	Kab. Tapanuli Utara	CC	B	B
23	Kab. Tapanuli Selatan	CC	CC	CC
24	Kab. Serdang Bedagai	B	B	B
25	Kab. Pakpak Bharat	B	B	B
26	Kab. Padang Lawas	C	CC	CC
27	Kab. Nias Selatan	C	C	CC
28	Kab. Nias	CC	B	B
29	Kab. Langkat	CC	B	B
30	Kab. Labuhanbatu Selatan	C	C	CC
31	Kab. Karo	C	C	CC
32	Kab. Deli Serdang	B	BB	BB
33	Kab. Batubara	CC	B	B

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan, pada tahun 2023 terdapat 13 Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat B dari yang sebelumnya pada tahun 2022 terdapat 12 Kabupaten/Kota yang memperoleh predikat B, dan hanya 2 kabupaten saja yang memperoleh predikat BB yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan nilai absolut 72.76 dan Kabupaten Deli Serdang dengan nilai absolut 71.21, kedua kabupaten tersebut memperoleh predikat SAKIP tertinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023. Sisanya, terdapat 18 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara masih mendapatkan predikat dibawah B (KemenPAN&RB, 2023). Kondisi ini menunjukkan pemerintah daerah di kabupaten/kota tersebut belum mampu menghasilkan kinerja dengan baik sesuai standar yang ditetapkan dalam SAKIP.

Ukuran pemerintah menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, diperlukan dukungan aset yang memadai. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin besar pula peluang bagi pemerintah untuk lebih mudah menjalankan kegiatan operasional dan roda pemerintahan daripada pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, ukuran pemerintah daerah yang lebih besar dapat meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pemerintah tersebut (Sari dan Mustanda, 2019). Penelitian Lestari et al (2019) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan aset

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Pemerintah daerah juga memiliki sumber kekayaan dari penerimaan yaitu berasal dari pendapatan salah satunya ialah pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri. PAD mencakup hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingginya tingkat kekayaan suatu daerah mencerminkan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut berjalan dengan optimal. Jika suatu daerah mampu meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya, maka kinerja daerah tersebut dapat dinilai baik (Ernawati et al, 2023). Penelitian Maulina et al (2021) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Tingkat ketergantungan daerah terhadap dana yang diterima dari pemerintah pusat di Indonesia tercermin dalam besarnya alokasi dana perimbangan. Dana perimbangan, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Ketergantungan yang tinggi pada dana tersebut dapat meningkatkan tingkat pengungkapan, karena adanya kebutuhan bagi pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan dana serta menilai pencapaian kinerja daerah terkait penggunaan alokasi dana yang telah diberikan (Safitri et al, 2023). Penelitian Safitri

et al, (2023) menyatakan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Belanja modal mencerminkan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang sedang berlangsung. Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semakin berdampak (*outcomes*) pembangunan terhadap masyarakat, maka semakin tepat penggunaan belanja modal tersebut. Penggunaan belanja modal yang tepat dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Safitri et al, 2023). Penelitian Ernawati et al (2023) menyatakan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian Meilisa dan Fadli (2024) juga menyatakan total belanja berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas publik pada Kabupaten/Kota Pemerintah Indonesia.

Penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al (2019) hasil penelitiannya menjelaskan, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK RI secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Semua variabel independen tersebut mampu menjelaskan oleh nilai determinasi mencapai 73.11%. Selanjutnya penelitian oleh

Meilisa dan Fadli (2024) penelitiannya bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal, Temuan Audit, dan Total Belanja terhadap Kualitas Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2021. Hasil penelitiannya menunjukkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas akuntabilitas publik. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas publik, dan total belanja berpengaruh positif terhadap kualitas akuntabilitas publik.

Berdasarkan permasalahan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti ulang variabel yang sama, yang mana belum pernah dilakukan penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, menjadikan penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah, Tingkat Kekayaan, Ketergantungan, dan Belanja Modal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum terlaksanakan dengan baik oleh beberapa pemerintah daerah.
2. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan penelitian sebelumnya serta merujuk pada latar belakang dan identifikasi masalah, ruang lingkup masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris Pengaruh Ukuran Pemerintah, Tingkat Kekayaan, Ketergantungan, dan Belanja Modal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran pemerintah, tingkat kekayaan, ketergantungan, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
2. Apakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah tingkat kekayaan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah ketergantungan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?
5. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menguji dan mendeskripsikan pengaruh ukuran pemerintah, tingkat kekayaan, ketergantungan, dan belanja modal secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Menguji pengaruh ukuran pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Menguji pengaruh tingkat kekayaan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Menguji pengaruh ketergantungan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5. Menguji pengaruh belanja modal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat signifikan bagi peneliti dengan memperluas wawasan dan pemahaman tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Melalui analisis seperti ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, dan belanja modal, peneliti dapat mengembangkan keterampilan analitis dan metodologi yang penting dalam bidang akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik

nyata, sehingga meningkatkan kredibilitas dan kompetensi peneliti di dunia akademis maupun profesional.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik yang bermanfaat bagi Universitas Negeri Medan, khususnya Fakultas Ekonomi, dalam memperkaya literatur terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian lanjutan yang relevan dalam bidang akuntansi sektor publik.

3. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi empiris yang berguna bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka. Dengan memahami pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, dan belanja modal pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.